



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan akan diselenggarakannya Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok, di New Delhi, India.

Untuk :

PERTAMA :

Menggunakan petunjuk-petunjuk sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976.

KEDUA:

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama Berlangsungnya Konperensi tersebut.

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976.

KELIMA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juli 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
S O E H A R T O



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN :  
Instruksi Presiden RI  
Nomor 12 Tahun 1976  
Tanggal 6 Juli 1976.

PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI MASS MEDIA  
NEGARA-NEGARA NON-BLOK DI NEW DELHI, INDIA

I. PENDAHULUAN

1. Konperensi mass media tingkat Menteri Penerangan negara-negara non-blok yang diselenggarakan di New Delhi, India, dari tanggal 8 sampai 13 Juli 1976, merupakan tindak lanjut Deklarasi Lima yang telah dicetuskan dalam Konperensi Menteri-menteri Luar Negeri negara-negara non-blok di Lima, Peru, bulan Agustus 1975.
2. Maksud Konperensi New Delhi ialah untuk merumuskan saran-saran tentang kerjasama mass media non-bldk yang akan diajukan kepada Konperensi Tingkat Tinggi negara-negara non-blok di Colombo bulan Agustus yang akan datang. Dalam hubungan ini, Konperensi New Delhi telah didahului oleh sebuah simposium mass media non-blok di Tunis tanggal 26 - 31 Maret 1976 sebagai pelaksanaan keputusan Konperensi Tingkat Tinggi non-blok di Aljazair tahun 1973 yang menyatakan perlunya disusun "plan of action" dalam rangka penggalangan mass media antar negara-negara non-blok. Hasil-hasil Simposium Tunis akan dipakai sebagai bahan referensi oleh Konperensi New Delhi dalam merumuskan saran-saran pertimbangannya kepada Konperensi Tingkat Tinggi non-blok di Colombo.
3. Dalam Konperensi New Delhi, terdapat dua aspek yang menonjol. Pertama, konperensi tersebut mencerminkan suatu tindakan politik negara-negara non-blok, karena setiap kegiatan penerangan, seperti halnya kegiatan-kegiatan bidang ekonomi dan sosial budaya, hakekatnya merupakan usaha untuk menunjang kepentingan nasional. Maka dalam rangka ini, penerangan mengambil peranan penting dalam membantu perjuangan masing-masing negara non-blok untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Kenyataan yang dihadapi negara-negara non-blok sekarang ialah bahwa sumber-sumber dan sarana penerangan atau komunikasi dalam dan antar negara-negara non-blok hampir sepenuhnya dikuasai oleh pusat-pusat komunikasi negara-negara maju. Dengan sendirinya mereka ingin pula memanfaatkan sumber-sumber atau sarana komunikasi yang dimilikinya untuk membela kepentingan negara-negara maju. Hal ini sering berakibat adanya informasi keliru atau pemutar-balikkan fakta-fakta yang pengaruhnya sangat merugikan perjuangan negara-negara non-blok.
5. Keinginan yang menggema dalam Simposium Tunis untuk menciptakan Orde Penerangan Internasional Baru merupakan manifestasi dari aspirasi rakyat negara-negara non-blok untuk melepaskan ketergantungannya pada sumber-sumber atau sarana komunikasi negara-negara maju. Di kalangan sementara negara non-blok keinginan tersebut bahkan telah ada yang diwujudkan dengan menggalang kerjasama mass media, khususnya pembentukan sistim "pooling kantor berita" dalam rangka penyebar luasan berita-berita antar negara-negara anggotanya secara timbal balik.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Aspek kedua yang menonjol dari Konperensi New Delhi ialah kondisi negara-negara non-blok sendiri.

Di dalam konperensi-konperensi non-blok sebelumnya, terlihat meningkatnya gejala radikalisme yang ditujukan terutama kepada negara-negara maju (Barat).

Hal ini antara lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Gerakan non-blok tidak lagi semata-mata dilandasi oleh sikap ingin bebas dari pertentangan ideologi antara "blok Barat" dan "blok Timur", melainkan sudah lebih memperlihatkan pertautan antara masalah negara kaya dan miskin;
  - b. Keadaan demikian membuka peluang bagi negara-negara "blok Timur" yang menggolongkan dirinya dalam negara miskin (berkembang) untuk ikut memasuki barisan non-blok ;
  - c. Dalam barisan non-blok negara-negara "blok Timur" tersebut, sejalan dengan usaha-usaha mereka yang berdimensi global di luar dunia non-blok, berusaha menanamkan pengaruh pada negara-negara non-blok lainnya, termasuk negara-negara Afrika Hitam dan Amerika Latin, dengan memelopori sikap-sikap radikal dalam rangka berpropaganda sebagai pahlawan-pahlawan penentang imperialisme, rasialisme dan lain-lain.
7. Meningkatnya gejala radikalisme tersebut dilihat pencerminannya dari sikap apriori konperensi-konperensi non-blok sebelumnya dalam masalah Vietnam, Laos, Kamboja, Angola dan lain-lain.
  8. Namun demikian, seperti tampak dalam Simposium Tunis, dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru akhir-akhir ini --termasuk negara-negara Arab dengan minyaknya--, ditambah dengan telah selesainya masalah-masalah seperti Vietnam, Laos dan Kamboja yang merupakan titik temu kuat bagi tumbuhnya sikap radikalisme, maka mulai nampak adanya gejala-gejala bagi dunia non-blok untuk kembali kepada sikap yang tidak a-priori dan lebih realistis.
  9. Pendekatan Pemerintah Yugoslavia terhadap Pemerintah Indonesia pada waktu diadakan sidang-sidang persiapan Simposium Tunis mencerminkan pula keinginan Pemerintah Yugoslavia untuk mengembalikan keseimbangan dalam gerakan non-blok, dalam hal ini dengan sasaran untuk sebanyak mungkin menetralisasi radikalisme seperti disuarakan Cuba.
  10. Dalam pada itu, kerjasama negara-negara non-blok akan memantapkan suasana yang diperlukan negara-negara anggotanya untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dalam pembangunan.

## II. PETUNJUK-PETUNJUK UMUM

11. Kehadiran Indonesia dalam Konperensi New Delhi mengemban tugas untuk menunjang berhasilnya politik pembangunan Pemerintah, dalam hal ini melalui forum non-blok. Dalam hubungan ini, seluruh pendekatan delegasi perlu diarahkan untuk mencapai semaksimal mungkin kondisi yang menunjang kelancaran usaha-usaha pembangunan di Indonesia.
12. Karena kelompok non-blok terutama merupakan kelompok politik, maka dengan akan diadakan Konperensi Tingkat Tinggi non-blok di Colombo yang akan datang, hendaknya delegasi mengadakan penjajagan suasana dan iklim di antara anggota-anggota non-blok secara umum, terutama dalam mengembalikan fungsi non-blok sebagai kekuatan obyektif untuk memantapkan perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, ketertiban dunia dan keadilan sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Dalam rangka ini hendaknya delegasi ikut merintis penggalangan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang hadir, negara-negara Arab, Afrika Hitam dan Amerika Latin untuk mengurangi gejala peningkatan sikap radikalisme dalam Konperensi Tingkat Tinggi Colombo yang akan datang. Sejalan dengan usaha ini, hendaknya delegasi sendiri menghindari sikap-sikap ekstrim dalam Konperensi New Delhi.
14. Delegasi hendaknya mengadakan pendekatan pula dengan wakil-wakil Vietnam dan negara-negara bekas "Indocina" yang hadir dalam Konperensi dalam rangka menjajagi sikap mereka yang sebenarnya terhadap ASEAN dan memberikan penjelasan mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang menyambut baik setiap kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara tersebut.
15. Di bidang ekonomi, hendaknya delegasi dapat mengarahkan agar kerjasama penerangan antar negara-negara non-blok dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang terbinanya tata ekonomi internasional baru.
16. Di bidang kebudayaan, delegasi hendaknya dapat memanfaatkan kerjasama penerangan antar negara-negara non-blok untuk menggalang kerjasama kebudayaan khususnya dalam meningkatkan pendidikan antar negara-negara non-blok.
17. Dengan mengingat pentingnya peranan penerangan dalam pembangunan maka usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan kita kepada sumber-sumber dan sarana komunikasi negara-negara maju perlu ditingkatkan. Forum non-blok dapat dipergunakan dalam mengembangkan kebijaksanaan ini. Dalam rangka ini, gagasan orde baru internasional bidang penerangan dapat diterima dalam prinsip, sedang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Untuk ini, delegasi hendaknya mengkaji setiap keputusan yang akan diambilnya dengan kepentingan nasional kita, dalam mana hasil-hasil Simposium Tunis khususnya dapat dijadikan bahan referensi.
18. Dalam rangka kerjasama mass media non-blok ini, kerjasama (mass media) regional dalam hubungan dengan ASEAN tetap mendapatkan prioritas sesuai dengan hasil-hasil keputusan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali. Hendaknya delegasi memanfaatkan Konperensi New Delhi untuk menggalang kesatuan sikap dengan negara-negara ASEAN yang hadir, dan mengembangkan langkah-langkah ke arah kerjasama mass media yang lebih mantap di lingkungan ASEAN.
19. Hendaknya delegasi mencegah setiap usaha yang ingin mempermasalahkan Timor Timur dalam segala aspeknya. Andaikata ada delegasi yang mengemukakan masalah Timor Timur dalam forum persidangan, hendaknya delegasi segera memberi penjelasan tentang duduk masalah sebenarnya.

### III. PETUNJUK-PETUNJUK KHUSUS

20. Segi kerjasama dalam bidang mass media yang akan menjadi acara pokok ialah sistim "pooling kantor-kantor berita" non-blok, di mana konperensi bermaksud memperluas, memantapkan dan memformalisasikan sistim "pooling" tersebut sebagai salah satu usaha konkrit dalam mewujudkan gagasan Orde Penerangan Internasional Baru. Dalam prinsip, Indonesia perlu ikut serta dalam sistim "pooling" tersebut dengan catatan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang akan diperolehnya. Kantor Berita yang ikut dalam sistim "pooling" tersebut adalah LKBN Antara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Dalam rangka formalisasi sistim "pooling" tersebut, di mana masalah Anggaran Dasar, struktur organisasi dan lain-lain dibicarakan hendaknya delegasi mengusahakan agar :
- a. Kriteria penentuan keanggotaan "pool" dibatasi pada tingkat negara untuk menghindarkan jangan sampai kaum separatis dalam sesuatu negara dapat menyelundup sebagai anggota.
  - b. Adanya jaminan bahwa berita-berita yang dikirim melalui "pool" disiarkan seutuhnya tanpa ada perubahan/pengurangan apapun yang dapat mengubah makna sesuatu pemberitaan dari aslinya.
  - c. Sedapat mungkin dicegah pemberitaan yang bersifat konfrontatif antara satu negara anggota dan lainnya.
  - d. Penjatahan berita yang adil, sekalipun tidak perlu panjang.
  - e. Kebebasan negara anggota untuk memilih berita-berita yang akan disiarkan atau tidak.
  - f. Sistim "pool" juga mencakup tulisan-tulisan "feature" dan "by-line stories" yang dikirimkan dengan pos udara.
  - g. Mengenai struktur organisasi, apabila akan dibentuk suatu lembaga kordinasi yang menangani "pool", hendaknya kita ikut serta sekalipun pengisiannya disesuaikan dengan kemampuan.
  - h. Mengenai pembiayaan, kita dalam prinsip menyetujui memberi iuran dengan catatan bahwa jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Antara.
22. Yang menyangkut kerjasama teknik dalam bidang pengurusan kantor berita antar negara non-blok, delegasi dapat menyatakan kesanggupan memberi bantuan teknik semacam itu dalam batas-batas kemampuan.

#### IV. LAIN-LAIN

23. Terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul dan dihadapi delegasi selama persidangan berlangsung keputusan diserahkan kepada Ketua Delegasi.
24. Dalam waktu sebulan setelah tiba kembali dari New Delhi, delegasi supaya memberi laporan lengkap tentang hasil-hasil Konperensi New Delhi kepada Presiden.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Juli 1976.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO